



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAN MASYARAKAT  
DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SWADAYA GOTONG ROYONG  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 18 TAHUN 2018 DI KEPENGHULUAN TELUK  
PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum  
( S1 ) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**MUHAMAD ZIRONI**

**NIM : 11627101080**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1443 H/2021 M**



## PERSETUJUAN

dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu”** yang ditulis oleh;

Nama : MUHAMAD ZIRONI

NIM : 11627101080

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Muharram 1442 H  
18 Agustus 2021 M

Pembimbing Skripsi

**Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH.**

**NIP. 197802272008011009**

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu” yang ditulis oleh;
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Ketua

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris

**Musrifah, SH., MH**

Penguji I

**Mur Hidayat, SH., MH**

Penguji II

**Lysa Anggrayni, SH., MH**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu”** yang ditulis oleh :

Nama : Muhamad Zironi  
Nim : 11627101080  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Telah dimunaqasahkan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 Oktober 2021**  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

**UIN SUSKA RIAU**



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr.H. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD ZIRONI  
 NIM : 11627101080  
 Tempat, Tgl. Lahir : Sei. KUBU 01 Mei 1997  
 Fakultas Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  
Dalam Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di  
Kepenghuluhan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan KUBU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, .....  
 Yang membuat pernyataan



NIM :

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta n l i n k U I N S u s k a R i a u  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Muhammad Zironi : Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu**

Pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan tidak dapat berjalan begitu saja tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat. Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir pelaksanaan pembangunan pedesaan dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan cara gotong royong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana konsep pembangunan swadaya gotong royong yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, Bagaimana tugas pembangunan dengan swadaya gotong royong oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu, Serta apa faktor penghambat pelaksanaan tugas Lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dengan swadaya gotong royong di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang di perlukan. Data Primer yang di dapat dari aparat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat. Data Sekunder di dapat dari buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Konsep pembangunan dengan swadaya dan gotong royong yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdapat di dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Kemudian pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu belum terlaksana dengan baik. Faktor penghambat pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu adalah diantaranya; (i) kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa; (ii) kurangnya partisipasi masyarakat; (iii) kurangnya lembaga pemberdayaan masyarakat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan dengan swadaya gotong royong; dan (iv) operasional lembaga pemberdayaan masyarakat tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayan Masyarakat Dalam Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Syofian, Ibunda Rusna, Kakak Kamsiah, Adik Muhammad Putra dan Suci Mardiah yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III dan Bapak Asril, SHi., MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH.. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Musrifah, SH., M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, 21 Oktober 2021

MUHAMAD ZIRONI

NIM : 11627101080

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu .....	18
1. Kondisi Umum Kepenghuluan.....	18
2. Sejarah Kepenghuluan .....	18
3. Sarana Dan Prasarana Umum Penghulu Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.....	19
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Penghulu Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu .....	21
5. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Penghulu Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu .....	22
6. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Penghulu Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.....	22
B. Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong.....	23
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Pemerintah Daerah.....	27
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	27
2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	30



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	32
4. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah.....	34
B. Sistem Pemerintahan Desa.....	37
C. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.....	45
D. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.....	47
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	47
2. Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	50
3. Bentuk-Bentuk Partisipasi.....	54
4. Tingkatan Partisipasi.....	55
5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	56
E. Teori Demokrasi.....	56

## BAB IV PEMBAHASAN

A. Konsep Pembangunan Dengan Swadaya Dan Gotong Royong Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018...	61
B. Pelaksanaan Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.....	65
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.....	73

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Populasi Dan Sampel .....	15
Tabel II.1	Prasarana Pendidikan .....	20
Tabel II.2	Prasarana Kesehatan .....	21
Tabel II.3	Struktur Organisasi Pemerintah Penghulu Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu .....	21
Tabel II.4	Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu .....	22
Tabel II.5	Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu .....	22

UIN SUSKA RIAU



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang daerahnya dibagi menjadi beberapa Provinsi dan Kabupaten dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah.”<sup>1</sup>

Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah mengalami proses perkembangan yang cukup panjang sampai saat ini telah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan Daerah. Ada dua aspek perubahan terhadap substansial menjadi warna berbagai produk undang-undang di Indonesia, peraturan mengenai susunan Pemerintahan Daerah dan corak serta kadar desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi Daerah.<sup>2</sup>

Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten. Urusan Pemerintah diselenggarakan oleh pemerintah sendiri atau dapat mengalihkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM, Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2020). h.18



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau Pemerintahan Desa.<sup>3</sup>

Pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan tidak dapat berjalan begitu saja tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat yang dimaksud agar masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan Desa. Partisipasi masyarakat perwujudannya terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi serta tujuan yang akan dicapai dari sebuah kebijakan.

Pembangunan Desa/Kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat. Disini jelas bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa berdampak pada suksesnya pembangunan nasional.<sup>4</sup>

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini tentu memiliki tugas dalam roda pemerintahan yang ada di desa. Adapun yang menjadi tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menurut Juita Lidya Tiwa, yaitu :

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013 ) h.363

<sup>4</sup> Marlina, Potensi Dan Kekayaan Desa Dalam Rangka Pembangunan Ekonom, *Jurnal Numbra Vol.1 No.2*, (2016), h, 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif,
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.<sup>5</sup>

Pemerintah desa tidak dapat berjalan begitu saja tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat dalam pemerintahan merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat yang dimaksudkan agar masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan yang ada.<sup>6</sup>

Partisipasi masyarakat perwujudannya terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi serta tujuan yang akan dicapai dari sebuah kebijakan. Partisipasi adalah meningkatnya kemampuan pemberdayaan setiap orang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih lama. Keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan sangat menentukan dalam rangka keberhasilan pencapaian tujuan. Ada empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pemerintahan, yaitu :<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Eti Armila, Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, *Journal Ilmu Pemerintahan*, 2 (4), 1441-1452, (2016), h 1443-1444

<sup>6</sup> Priyanto, Peran Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa Munggun Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Volume 2 Nomor 1, (2019), h, 124

<sup>7</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan di Republik Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (3) menjelaskan bahwa :

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*<sup>8</sup>

Kemudian berdasarkan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa :

1. *Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.*
2. *Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :*
  - a. *menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.*
  - b. *mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat.*

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 94 tentang Desa menjelaskan bahwa :

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
3. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 94

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (5) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjelaskan bahwa:

*Lembaga pemberdayaan masyarakat bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.*<sup>11</sup>

Pembangunan Desa dengan konsep swadaya gotong royong berarti bahwa Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan pembangunan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Misalnya Pembangunan Desa dengan konsep swadaya gotong royong diantaranya gotong royong dalam mengelola tanah, gotong royong dalam membangun jalan dan/atau gotong royong dalam membangun jembatan pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa, kemudian masyarakat yang bekerja diberi upah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan Desa dengan konsep swadaya gotong royong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan Desa/Kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek

---

<sup>11</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 7 ayat (5)

kebutuhan masyarakat. Disini jelas bahwa pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa berdampak pada suksesnya pembangunan nasional.

Permasalahan yang terjadi bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir belum menjalankan tugasnya dalam menggerakkan masyarakat dalam pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong, buktinya masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Kegiatan pembangunan desa dikerjakan oleh pekerja borongan yang bukan merupakan masyarakat desa. Padahal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dikepenghuluan dengan swadaya gotong-royong. Pelaksanaan pembangunan dikepenghuluan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tidak menjalankan tugasnya dalam menggerakkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong-royong, buktinya masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dikepenghuluan dengan swadaya gotong royong. Kegiatan pembangunan dikepenghuluan dikerjakan oleh pekerja borongan yang bukan merupakan masyarakat Kepenghuluan. Hal tersebut dibenarkan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa memang terhadap kegiatan pembangunan yang ada tidak dikerjakan berdasarkan swadaya gotong royong.<sup>12</sup> Oleh karena itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir belum terjalin kerja samanya dengan Pemerintah Desa sebagai mitra kerja dalam melaksanakan pembangunan dengan swadaya gotong royong.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui dari pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menggerakkan masyarakat terhadap melaksanakan pembangunan dengan swadaya gotong royong. Maka dari itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul penelitian **“Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu”**.

---

<sup>12</sup> Hotman Marpaung, (Ketua BPKep Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir), wawancara, Tanggal 28 November 2020

## Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap bagaimana pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong.

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pembangunan swadaya gotong royong yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
2. Bagaimana tugas pembangunan dengan swadaya gotong royong oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu
3. Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas Lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dengan swadaya gotong royong di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui konsep pembangunan dengan swadaya dan gotong royong yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong oleh Lembaga pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan tugas Lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dengan swadaya gotong royong di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.

### **2. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoretis
  - a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
  - b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan satu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pelaksanaan tugas Lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dengan swadaya gotong royong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dengan swadaya gotong royong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.

3. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

**E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.<sup>13</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) jilid 1, h.1.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h 24

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yang bersifat yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas yang berlaku. Dalam penelitian sosiologis dapat di pandang sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural.<sup>15</sup> Dengan cara survei berbentuk penelitian yang di laksanakan di lapangan untuk memperoleh data yang di perlukan sehingga dapat menjawab permasalahan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan di lihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang di dapatkan secara lengkap dan terperinci mengenai bagaimana pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan dengan swadaya gotong royong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu. Alasan penulis mengambil penelitian disini karena melihat permasalahan yang ada di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir tentang pembangunan dengan swadaya gotong royong tidak berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung dari hasil wawancara atau

<sup>15</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, rajawali, Jakarta, 2014, h.167

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*interview* dengan responden serta data-data lainnya yang diperoleh dari objek penelitian. Seperti aparat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.<sup>16</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup> Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang di bahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014  
Peraturan Tentang Pelakasana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang  
Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 31



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

## 4. Populasi dan Sampel

### a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>18</sup> Adapun yang di jadikan populasi dan sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Penghuluan Teluk Piyai Pesisir
2. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir
3. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Teluk Piyai Pesisir
4. Tokoh Masyarakat Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir

### b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah bagian atau sebagian

<sup>18</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, rajawali, Jakarta, 2014, h.167

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.<sup>19</sup> Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Datuk Penghulu dan Perangkat Teluk Piyai Pesisir	8 Orang	2 Orang	80%
2.	Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir	9 Orang	2 Orang	70%
3.	Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Teluk Piyai Pesisir	8 Orang	2 Orang	80%
4.	Tokoh Masyarakat Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir	5 Orang	3 Orang	90%
	Jumlah	30 orang	9 Orang	

*Data Olahan Tahun 2021*

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

<sup>19</sup> *ibid*, h. 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal dan Undang-undang.

**6. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis kualitatif ialah cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, dalam pengertian apa yang di nyatakan secara tertulis.<sup>20</sup> penulis mengumpulkan data dari observasi yang terbatas dengan beberapa responden yang di wawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, kemudian di lakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum dan data-data lainnya.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, tinjauan umum tentang

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1996, h. 32

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, serta pembangunan dengan swadaya dan gotong royong.

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep pemerintahan daerah, konsep sistem pemerintah desa, tugas Lembaga pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu, serta konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan teori demokrasi.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana konsep pembangunan swadaya dan gotong royong yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, bagaimana tugas pembangunan dengan swadaya gotong royong oleh Lembaga Pemberdayan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu, serta faktor penghambat pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayan Masyarakat dalam pembangunan dengan swadaya gotong royong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

##### 1. Kondisi Umum Kepenghuluan

Pentingnya memahami kondisi Kepenghuluan untuk mengetahui kaitannya dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan serta sebagai data pendukung untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir salah satu dari sembilan Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Kubu yang terletak kurang lebih 13 KM ke arah Barat dari Kecamatan Kubu, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir mempunyai wilayah seluas 84 KM<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 2982 dan jumlah Kepala Keluarga 800.<sup>21</sup>

##### 2. Sejarah Kepenghuluan

Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir berdiri pada Tahun 2011, merupakan Kepenghuluan pemekaran dari Kepenghuluan induk yaitu Kepenghuluan Teluk Piyai. Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah serta keinginan yang kuat dari masyarakat dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk serta kondisi sosial masyarakat dan untuk mendapatkan pemerataan pembangunan. Maka para tokoh masyarakat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah sesuai prosedur untuk dimekarkan menjadi Kepenghuluan baru.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Profil Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir

<sup>22</sup> *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berkat perjuangan para tokoh masyarakat ketika itu bersama Datuk Penghulu pertama Bapak Amat Yasin, dan dibantu sepenuhnya oleh Camat Kubu Bapak Asrul., S.Sos maka setelah penyelesaian proses administrasi maka status Teluk Piyai Pesisir resmi menjadi Kepenghuluan. Dalam status pemerintahan,

Kepenghuluan dipimpin oleh seorang Datuk Penghulu. Adapun Penghulu yang pernah menjabat di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir sebagai berikut:

1. Periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dipimpin oleh Datuk Penghulu Amat Yasin
2. Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 dipimpin oleh Datuk Penghulu Fakhurrozi sebagai PLT yang diutus dari Kecamatan.
3. Periode Tahun 2016 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Datuk Penghulu Supriyanto.

**3. Sarana Dan Prasarana Umum Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu**

**a. Prasarana Pendidikan**

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Oleh sebab itu di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir diperlukan tersedianya prasarana pendidikan yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk Kepenghuluan setempat. Adapaun prasarana pendidikan di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yaitu seperti terdapat pada tabel berikut<sup>23</sup> :

**Tabel II.1**  
**Prasaran Pendidikan**

No	Prasaran Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	5
2.	Sekolah Dasar (SD)	3
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
Jumlah		9

Sumber : *Kantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir*

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir terdapat 5 Unit Taman Kanak-Kanak (TK), 3 Unit Sekolah Dasar (SD), 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMP).

**b. Prasarana dan Sarana Kesehatan**

Kesahatan merupakan hal yang tidak tepisahkan dari kehidupan manusia karena didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Didalam peningkatan kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan bersih dan sehat merupakan bagian penting dari proses pembangunan kesehatan masyarakat. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat diperlukan peran serta masyarakat itu sendiri. Hal ini akan membawa pengaruh dalam peningkatan kualitas hidup sehingga akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Di Kepenaghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir terdapat beberapa fasilitas kesehatan sebagai berikut:

<sup>23</sup> *Ibid.*,

**Tabel II.2**  
**Sarana Kesehatan**

No	Prasarana dan Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Puskesmas	1
2.	Pos Kesehatan Nagari (Poskesri)	1
3.	Posyandu	5
Jumlah		7

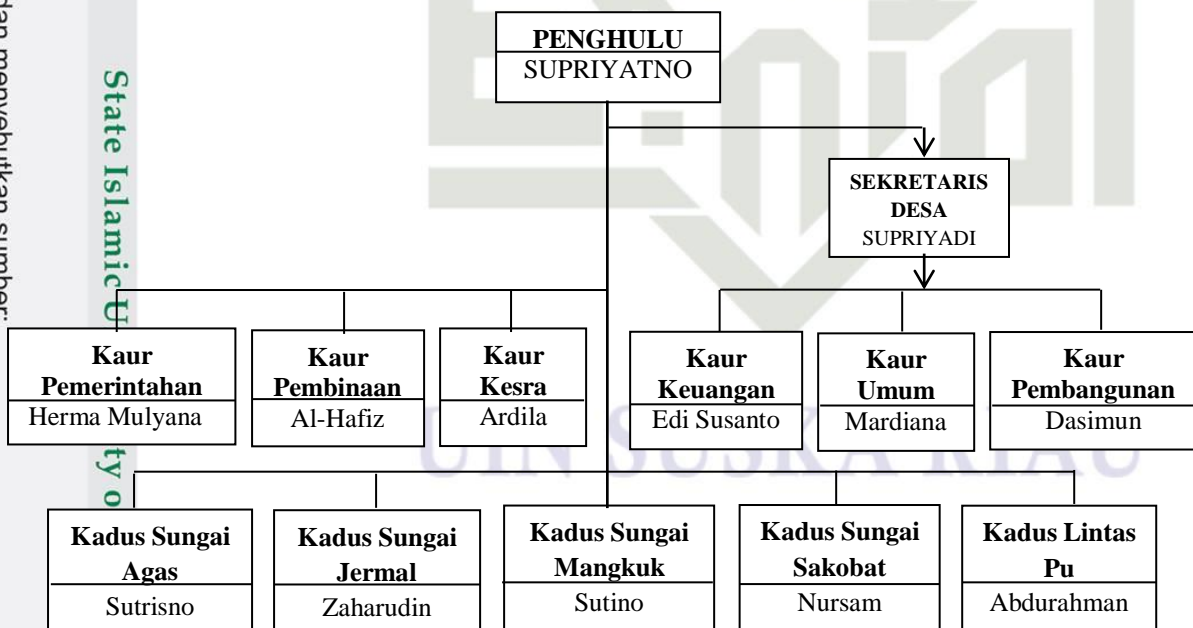
Sumber : *Kantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir*

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir terdapat 1 Unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 2 Unit Pos Kesehatan Nagari (Poskesri), 5 unit Pos Layanan Terpadu (Posyandu).

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.

**Tabel. II.3<sup>24</sup>**

**Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir**



Sumber : *Kantor Desa Teluk Piyai Pesisir*

<sup>24</sup> Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

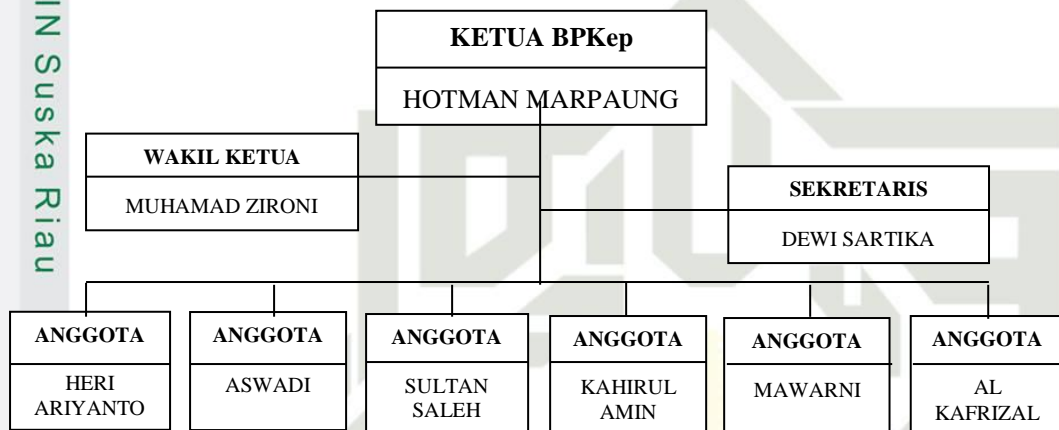
© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 5. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir.

Tebel. II.4

### Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan

#### Teluk Piyai Pesisir



Sumber : Kantor Penghulu Teluk Piyai Pesisir

## 6. Struktur Organisasi Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Piyai Pesisir

Tebel. II.5<sup>25</sup>

### Struktur Organisasi Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Piyai Pesisir



Sumber : Kantor Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir

<sup>25</sup> Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Pembangunan Swadaya Dan Gotong Royong

Swadaya (*self-help*) adalah setiap tindakan sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau sekelompok manusia yang bertujuan untuk pemuasan kebutuhan-kebutuhan atau aspirasi-aspirasi individual atau kolektif. Ciri khas dari suatu inisiatif atau kegiatan swadaya adalah adanya sumbangan dalam jumlah besar yang diambil dari sumber-sumber daya yang dimiliki sendiri oleh individu atau kelompok.<sup>26</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia, “swadaya” memiliki arti “kekuatan sendiri”. Kekuatan sendiri berarti kekuatan yang berasal dari dalam diri sendiri.<sup>27</sup> Kekuatan itu bisa merupakan materi dan bukan materi. Materi berupa uang dan barang, sedangkan non materi bisa jadi tenaga, saran maupun pemikiran. Kekuatan tersebut tidak akan memiliki arti dan manfaat jika tidak digunakan.

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.<sup>28</sup> Masyarakat adalah fenomena antar waktu. Masyarakat terjelma bukan karena keberadaannya di satu saat dalam perjalanan waktu. Ia adalah jelmaan waktu. Masyarakat ada setiap saat dari masa lalu ke masa mendatang. Kehadirannya justru melalui fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi dalam masyarakat kini terkandung pengaruh, bekas dan jiplakan masa lalu serta bibit dan potensi untuk masa depan, sifat berprosesnya masyarakat secara tersirat berarti bahwa fase sebelumnya berhubungan sebab-akibat dengan

<sup>26</sup> Koenraad Verhagen, *Pengembangan Keswadayaan (Pengalaman LSM di Tiga negara)*, Jakarta: Puspa Swara, 1996) hlm.22.

<sup>27</sup> Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 728.

<sup>28</sup> Burhan Bugim, *Sosiologi Komunikasi ,Teori Paradigma Dan Dikursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fase kini dan fase ini merupakan pesyaratan sebab akibat yang menentukan fase berikutnya.<sup>29</sup>

Setelah menjabarkan makna dua kata diatas maka selanjutnya dapat di pahami bahwa swadaya masyarakat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mewujudkan sebuah keinginan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri.<sup>30</sup>

Keberhasilan pembangunan desa tidak lepas dari peran serta masyarakat. Sejalan dengan itu, kualitas pembangunan sangat tergantung dari tingginya swadaya masyarakat dalam partisipasi pembangunan. Swadaya masyarakat berkenaan tentang keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan yang terjadi disuatu daerah atau pendesaan. Koesnadi Hardja Soemantri berpendapat bahwa swadaya masyarakat dalam membangun desa adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.<sup>31</sup> Dimana setiap upaya dilakukan sendiri oleh masyarakat. Dengan kata lain swadaya masyarakat adalah solusi alternatif untuk mebenahi krisis kekurangan yang terjadi dimasyarakat.<sup>32</sup>

Jika kekuatan dan kemampuan masyarakat digunakan, dalam arti kata disampaikan, diberikan kepada pihak atau orang lain untuk sebuah kebutuhan

<sup>29</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2008) hlm. 65.

<sup>30</sup> Bactiar Hasyim, *Swadaya Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: SC Yalampers, 2008) hlm. 37-38.

<sup>31</sup> Koesnadi Hardja Soemantri, *pemberdayaan Masyarakat Berwawasan*, hal. 61.

<sup>32</sup> Bactiar Hasyim, *Swadaya Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: SC Yalampers, 2008) hlm. 32.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka sebenarnya telah melakukan sebuah darma. Dengan demikian swadaya identik dengan darma. Darma ini bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun.<sup>33</sup>

Pembangunan meliputi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat dimana pembangunan dilanjutkan pada kebijaksanaan yang berdasarkan konsep pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta stabilitas yang dinamis. Adapun pembangunan itu terbagi atas dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.<sup>34</sup> Pembangunan di desa sangat identik dengan pembangunan fisik yaitu pengadaan fasilitas-fasilitas yang baru misalnya perbaikan jalan dan semenisasi, pembangunan jembatan, pembangunan balai desa, pembangunan gorong-gorong dan lainnya.

Swadaya masyarakat dalam pembangunan fisik adalah keterlibatan masyarakat untuk ikut serta pada tiap-tiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di desa. Peran serta masyarakat dapat berupa dana dan jasa. Pada umumnya dalam pembangunan fisik swadaya masyarakat berupa jasa, sedangkan dana bersumber dari pemerintah atau bantuan lembaga non pemerintah. Salah satu karakteristik pembangunan fisik di pedesaan adalah adanya hakekat dari pembangunan yang tidak semata-mata bersifat materialistis tetapi lebih mengedepankan swadaya masyarakat. Pengertiannya bahwa pembangunan sarana dan prasarana desa dilaksanakan dalam imbanan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ibid...h.38

<sup>34</sup> Wayan Mahayana, *Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa* (Ejurnal Ilmu Pemerintahan, 2013) h.403.

<sup>35</sup> Bactiar Hasyim, *Swadaya Masyarakat Desa*, (Yogyakarta: SC Yalampers, 2008) hlm.35.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Realitanya pemerintah menjadi jembatan atau sebagai pelayan dan memberi kemudahan-kemudahan serta memberikan bantuan dan pengawasan, sementara masyarakat sebagai prakarsa dan berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, sehingga mampu memecahkan permasalahan di desa.<sup>36</sup>

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tersebut diatas, peran serta masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya sangat penting, dimana setiap pekerjaan dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan swadaya dan gotong-rojong. Dengan demikian masyarakat akan tahu kualitas dan ketahanan bangunan yang mereka buat, untuk bertahan dalam waktu lama. Sehingga pembangunan fisik di desa dapat tumbuh merata dan tidak terfokus pada pembangunan jenis itu-itu saja.

---

<sup>36</sup> Peter Hagul, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 1992) hlm.22.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Pemerintah Daerah

#### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas Negara/pemerintah merupakan tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintah diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Pemerintah Daerah adalah aparat yang menjalankan pemerintahan yang mempunyai batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri.<sup>37</sup>

Menurut Sri Maulidiah bahwa “Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk-bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi

<sup>37</sup> Pasal 1 angka (3), Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perangkat sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Jadi, pemerintah daerah berarti semua organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan daerah yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang ada di daerah. Daerah itu bersifat otonom dengan dibentuk Badan Perwakilan Rakyat atau hanya berupa daerah administrasi saja. Daerah besar dan kecil yang diberikan kewenangan otonomi bukan merupakan negara bagian, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Memberikan otonomi daerah tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan bawah, tetapi juga mendorong aktivitas bagi lingkungannya sendiri, dengan berkembangnya pelaksanaan demokrasi dari bawah, masyarakat tidak saja dapat menentukan nasibnya sendiri melalui pemberdayaan masyarakat, melainkan yang utama adalah berupaya untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah guna mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan*, Volume III, Nomor 1 April 2017

<sup>39</sup> Mohamad Yuhdi Batubara, *Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, Nomor 1 Februari 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>40</sup>

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerahh dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, kewenangan pengelolaan keuangan.

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

---

<sup>40</sup> Pasal 1 angka (2), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## 2. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### a. Asas Hukum

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya mendasari peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum.<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran yang dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam atau di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari; asas dekosentrasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan.

### b. Asas Dekosentrasi

Dekosentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung

<sup>41</sup> Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang : Setara Press, 2016), h. 50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab urusan pemerintah umum. Sedangkan pengertian dari Instansi Vertikal, yaitu perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekosentrasi.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas dekosentrasi merupakan pelimpahan kewenangan terhadap sebagian urusan pemerintah pusat, dari pemerintah pusat kepada pejabat dan perangkat pemerintah pusat di daerah.

#### c. Asas Desentralisasi

Menurut Koesomahatmaja dalam Koswara adalah peimpahan kekuasaan pemerintahan pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah merupakan system untuk mewujudkan asas demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan kekuasaan negara.

Asas Desentralisasi menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepadadaerah otonom berdasaeakan asas otonomi. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dan didasarkan pada asas otonomi daerah.

---

<sup>42</sup> Pasal 1 angka (9), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 3. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

Pertanggungjawaban pada awalnya, asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (*recht bescherming*) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (*verhoogdrecht bescherming*) bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan. Menurut SF. Marbun, asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki arti penting dan fungsi berikut :

- a. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samara tau tidak jelas.
- b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai dasar gugatan.
- c. Bagi hakim Tata Usaha Negara, dapat dipergunakan sebagai alat menguji

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

- d. Selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.

Prinsip *good governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien.<sup>44</sup> *Good Governance* mengandung pengertian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan yang berhubungan dengan kepemimpinan. *Good Governance* juga merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih atau tata kelola yang baik dan benar.<sup>45</sup>

Dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara bertindak untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara akan melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan perlindungan hukum secara lebih baik bagi warga masyarakat pada tahun 1950 pantia de Monchy di Nederland telah membuat asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur* atau *the general principles of good administration*). Adapun asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya:

<sup>44</sup> Yulia Neta, *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, Agustus, 2012, h. 2

<sup>45</sup> Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, *Majalah Ilmiah Widya*, Vol. 29 No. 31 April. 2012, h. 18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Oleh sebab itu, suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata bahwa dalam pemberian lisensi itu ada kekeliruan administrasi negara. Lisensi yang tidak boleh dicabut kembali itu haruslah berupa keputusan administrasi negara yang telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil.

#### b. Asas Jangan Mencampur Adukan Kewenangan

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu.

#### c. Asas Keadilan atau Kewajaran

Asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang-sewenang atau berlaku tidak layak.

#### d. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.

### 4. Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Pasal 65 ayat (1), dijelaskan mengenai tugas dari kepala daerah<sup>46</sup>, tugas yang dimaksud yaitu :

<sup>46</sup> Roni Rustandi, *Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. *Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD*
2. *Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat*
3. *Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD*
4. *Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD. Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang penanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama*
5. *Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
6. *Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sedangkan tugas dari wakil kepala daerah menurut Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2015 Pasal 66 ayat (1),<sup>47</sup> yaitu :

1. *Membantu kepala daerah dalam :*
  - a. *Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;*

<sup>47</sup> Nomor 9 tahun 2015, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Kebijakan, Vol. 4 No. 1, Juli, 2017, h. 41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
  - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur;
  - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
2. Memberikan sarandan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
  4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.<sup>48</sup>

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan hubungan tersebut meliputi

---

<sup>48</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 104

hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

## B. Sistem Pemerintah Desa

Dalam teori Hukum Tata Negara, pembagian tugas dan atau wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal adalah pembagian tugas dan atau wewenang menurut fungsinya yang mana petugas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan sama dengan petugas lain yang ruang lingkupnya berbeda.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> R. Abdoel Djamil, *pengantar hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 89



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian secara vertikal adalah pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatannya yang mana petugas dalam melaksanakan tugas dan atau wewenangnya mempunyai kedudukan yang berbeda tingkatannya dengan petugas lain; petugas yang lebih tinggi kedudukannya dapat melimpahkan tugas dan atau wewenang kepada petugas yang lebih rendah kedudukannya. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program otonomi dan desentralisasi dalam konsep Negara kesatuan, merupakan salah satu bentuk pembagian tugas dan wewenang dengan cara vertikal.<sup>50</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa di bumi nusantara ini bukan adopsi dari sistem negara penjajah melainkan asli dari masyarakat Indonesia. Keaslian itu diakui oleh van vollenhoven dalam bukunya *Staatsrecht overze* bahwa pada tahun 1996 ketika kapal berbendera Belanda yang pertama memasuki perairan kepulauan Indonesia wilayah ini secara hukum ketatanegaraan bukanlah wilayah yang "liar dan kosong". Di sana terdapat setumpuk lembaga-lembaga pengaturan dan kewibawaan, meliputi pemerintahan oleh atau terhadap suku-suku, desa-desa, persekutuan-persekutuan republik dan kerajaan-kerajaan.<sup>51</sup>

Untuk Pemerintahan Desa sebenarnya tidak ada ketentuan Perundangan Undangan yang secara tegas menyatakan bahwa Desa merupakan Daerah Otonom, namun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, kesatuan masyarakat adalah hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Dasril Rajab, *Op. Cit*, h. 144

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.<sup>52</sup>

Ketentuan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Dari ketentuan ini dapat kita menyimpulkan bahwa kalimat "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat". ini dapat diartikan Desa adalah daerah otonom karena adanya kewenangan yang diberikan perundangan-undangan kepada desa untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakat desa setempat, yang mana kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri merupakan inti makna dari istilah otonomi.<sup>53</sup>

Secara umum desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan "peradaban" yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencarian yang umumnya dari sektor pertanian.<sup>54</sup> Penyebutan desa lebih akrab ditelinga orang Jawa, Madura dan Bali, Dusun dan Marga (sumatraa selatan), Dusundati (Maluku), Kuta atau Huta (Batak), Nagari (Minangkabau), Aceh menyebutnya Gampong.

Sedangkan sebutan Kepala Desa juga menggunakan istilah yang berbeda pada tiap-tiap bagian daerah seperti di daerah Tapanuli Kepala Desa disebut Kepala

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>54</sup> Suhartono, dkk, *Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonoi Daerah*, (Jogyakarta : Laper Pustaka Utama, 2001) h. 9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nagari, di Sumatra Selatan disebut dengan nama Pesirah, di daerah Jawa disebut dengan Lurah, di daerah Bali disebut Tembung, di daerah Sulawesi Utara disebut Hukum Tua, di daerah Maluku disebut Kepala Nagari dan di berbagai daerah di Papua disebut Kurano. Masih banyak lagi sebutan yang bercorak ragam menurut istilah-istilah daerah setempat yang sebenarnya mempunyai pengertian yang sama.<sup>55</sup>

Susunan desa-desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu:<sup>56</sup>

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Selain dari pada itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang unsur-unsur yang harus ada dalam suatu desa yaitu:

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif berserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah pertambahan kepadatan, persebaran dan mata pencarian penduduk desa setempat.

<sup>55</sup> Wasistiono Sadu dan Irwan Tahir, *Prospek Perkembangan Desa*, (Bandung : CV Fokus Media, 2007) h. 9

<sup>56</sup> *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).<sup>57</sup>

Dalam pengertian sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam.<sup>58</sup>

Dari sudut pandang politik dan administrasi pemerintahan, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Pengertian tersebut termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian dalam pengertian ini, masih belum tergambar secara jelas mengenai kualitas otoriter yang dimiliki oleh desa.<sup>59</sup>

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut ketentuan ini Desa adalah suatu masyarakat umum

<sup>57</sup> *Ibid*, h.10

<sup>58</sup> Suhartono, dkk, *Op. Cit*, h.10

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 14

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya otoritas politik di dalam suatu komunitas yang disebut dengan desa secara internal mudah dipahami, dengan melihat sejarah perkembangannya. Secara faktual jumlah penduduk bertambah dan masalah-masalah berkaitan dengan kepentingan masyarakat bertambah. Kenyataan tersebut sudah barang tentu mendorong munculnya suatu otoritas yang diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang merealisasikan aspirasi yang berkembang. Dari berbagai pengertian desa tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan ada beberapa ciri desa secara umum<sup>60</sup> :

1. Desa umumnya terletak sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi).
2. Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi dominan.
3. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakat
4. Tidak seperti di kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh dirinya sendiri”.
5. Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif ketat dari pada kota.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di jelaskan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>61</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa “Pemerintahan Desa sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi Penyelenggaraan Urusan Bidang Eksekutif yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah desa melalui Kepala Desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan.<sup>62</sup>

Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

<sup>62</sup> Bambang Trisantono Sumantri, *Op.Cit.* h. 3-4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>63</sup>

Sedangkan penyelenggaraan urusan bidang legislatif dibentuk suatu Badan Perwakilan Desa yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala Desa sebagai wujud demokrasi.<sup>64</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>65</sup>

Undang-Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur, bahwa pada Pemerintahan Desa terdapat dua unsur penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Pemerintah Desa yang dipimpin Kepala Desa sebagai unsur eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif. Undang-Undang ini memberikan penegasan terhadap adanya pembagian kekuasaan pada Pemerintahan Desa.<sup>66</sup>

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>64</sup> H.A.W. Widjaja, *Op.Cit* .h. 93

<sup>65</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## **Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018**

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.<sup>67</sup>

Tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa meliputi:

- a. *mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;*
- b. *mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan Desa; dan*
- c. *menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa dijelaskan bahwa LKD bertugas:

- a. *melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;*
- b. *ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan*
- c. *meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.*
- d. *Dalam melaksanakan tugas LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.*

<sup>67</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lmbaga Adat Desa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Kemudian dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas

LKD memiliki fungsi:

- a. *menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;*
- b. *menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;*
- c. *meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;*
- d. *menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;*
- e. *menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;*
- f. *meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan*
- g. *meningkatkan kualitas sumber daya manusia.*

Selanjutnya Pasal 6 dijelaskan bahwa:

1) *Jenis LKD paling sedikit meliputi:*

- a) *Rukun Tetangga;*
- b) *Rukun Warga;*
- c) *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;*
- d) *Karang Taruna;*
- e) *Pos Pelayanan Terpadu; dan*
- f) *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.*

2) *Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.*

3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai LKD ditetapkan dalam Peraturan Desa.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian diperjelas dalam Pasal 7 ayat (5) yang menyatakan bahwa:

*“Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong”.*

#### D. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

##### 1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Aprillia Theresia partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.<sup>68</sup> Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.<sup>69</sup>

Britha Mikkelsen, mendefinisikan partisipasi menjadi 6 arti yaitu :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah kemauan pihak masyarakat untuk meningkatkan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek pembangunan.

<sup>68</sup> Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 198.

<sup>69</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, ( Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007), h. 27.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemanfaatan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.<sup>70</sup>

Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L., Gillin dan J.P Gillin sepakat bahwa istilah masyarakat adalah adanya saling bergaul dan interaksi karena adanya nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identifikasi bersama.

Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Dengan demikian, rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan

<sup>70</sup> Britha Mikkelesen, *Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h.64.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan serta melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Beberapa ahli yang lain juga memberikan definisi masyarakat yaitu :

- a. Ralph Linton mengatakan Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
- b. Mac Iver dan Page mengatakan bahwa Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah.
- c. Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Berdasarkan pengertian tentang masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya keterikatan untuk mencapai tujuan bersama.

Berkaitan dengan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, Bintoro Tjokromidjojo menjelaskan bahwa:

- a. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan. Ini bisa berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber pembiayaan dalam pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan lain-lain.
- c. Keterlibatan dalam memetik hasil dari pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah atau golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya dalam bentuk kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan-kesempatan dan pembinaan tertentu.

Dapat penulis simpulkan partisipasi masyarakat adalah Suatu tindakan keikutsertaan masyarakat didalam kegiatan pembangunan desa untuk terlaksananya pembanguann desa yang efektif dilakukan dengan musyawarah agar sesuai dengan prosedur yang ada dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

## 2. Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Telaahan tentang pengertian “Partisipasi” yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi atau peran serta, pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan suka rela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai karena itu, Yadv dalam bukunya Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

#### a. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan.

Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relative terbatas sedangkan program pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relative banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program yang ada dimasyarakat.<sup>71</sup>

Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasarkan besar kecilnya tingkat kepentingan), dengan demikian pelaksanaan program pembangunan akan terlaksana secara efektif dan efisien.

<sup>71</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Desa Partisipatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), Cetakan Pertama, h.34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan penyusunan program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilakukan secara optimal.<sup>72</sup>

Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan:

- 1) Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
- 2) Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (fore casting) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, perkiraan dilakukan mengenai potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi, perencanaan mengusahakan supaya ketidak pastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
- 3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
- 4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran kegiatan usahanya.
- b. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

---

<sup>72</sup> Ibid., h. 35

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibentuknya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal.

#### c. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Ibid., h.83

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### d. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sebagai diperlukan.

#### e. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesekurelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.<sup>74</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Peran serta masyarakat antar satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda dengan sesuai kapasitas dan kemampuan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan. Perbedaan wujud partisipasi ini kemudian akan memunculkan beberapa bentuk partisipasi yang berbeda-beda. Ndraha berpendapat bahwa partisipasi bentuknya dapat berupa: kontak sosial dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial, partisipasi dalam memperhatikan dan memberi tanggapan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 84

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap informasi, baik menerima maupun menolaknya, partisipasi dalam perencanaan dan penetapan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dan partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan program pembangunan.

Menurut Dusseldorp mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat;
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.<sup>75</sup>

#### 4. Tingkatan Partisipasi

Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, menurut Wilcox mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan, yaitu:

- a. Memberikan informasi (information);
- b. Konsultasi (consultation) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut;

<sup>75</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 84.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Pengambilan keputusan bersama (deciding together), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang diperlukan guna pengambilan keputusan;
- d. Bertindak bersama (acting together), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan;
- e. Memberikan dukungan (supporting independet community interest) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.<sup>76</sup>

#### 5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Salah satu yang memepengaruhi partisipasi masyarakat adalah rencana pembangunan yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, keterlibatan masyarakat dapat lebih terlaksana apabila rencana pembangunan itu sendiri berorientasi kepada kepentingan masyarakat terutama oleh para cendikiawan akhir-akhir ini diemukakan perlunya diberikan perhatian terhadap aspek dan pemerataan pembangunan.<sup>77</sup>

#### E. Teori Demokrasi

Dari sudut pandang etimologi Demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *cretain* (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah. Menurut tafsir R. Krenenburg, bahwa perkataan

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 86

<sup>77</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES*, Cet. Ke-3 (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), h. 208.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.<sup>78</sup>

Sementara itu, dalam kamus *Dictionary Websters*, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih daibawah sistem pemilihan umum yang bebas.<sup>79</sup>

Menurut Dahlan Thaib “Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah suatu pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.

Selanjutnya Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan secara langsung didasarkan kepada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.<sup>80</sup>

Menurut Affan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut ;

<sup>78</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2003), h.98

<sup>79</sup> Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2016), h.27

<sup>80</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;
- e. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul berserikat dan lain-lain.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa

lembaga, yaitu :

- a. Pemerintah yang bertanggung jawab;
- b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dalam pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan

Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik disetiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- b. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
- e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cermin demokrasi, antara lain:
  - 1) Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul)
  - 2) Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat)
  - 3) Hak memilih dan dipilih
  - 4) Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan public
  - 5) Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pemilu yang bebas dan adil
- 7) Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.

Prinsip-prinsip demokrasi diantaranya<sup>81</sup> :

- a. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum
- b. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
- c. Pemancaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda.
- d. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
- e. Kejujuran dan terbuka untuk umum
- f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan

---

<sup>81</sup> *Ibid.* h.33

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep pembangunan dengan swadaya dan gotong royong yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdapat di dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong oleh Lembaga Pemberdayan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.
3. Faktor penghambat pelaksanaan tugas lembaga pemberdayan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu adalah diantaranya; (i)



kurangnya dukungan dari Pemerintah Desa (ii) kurangnya partisipasi dari masyarakat; (iii) kurangnya lembaga pemberdayaan masyarakat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan dengan swadaya gotong royong; dan (iv) operasional lembaga pemberdayaan masyarakat tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## B. Saran

Untuk terlaksananya pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, maka setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir diharapkan agar lebih efektif lagi dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 .
2. Faktor penghambat pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong di Desa Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu maka kedepannya harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dengan swadaya gotong royong dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya pembangunan desa dengan konsep swadaya gotong royong.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aprillia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM, Aparatur Pemda dan Anggota DPRD.*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2020
- Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995
- Burhan Bugim, *Sosiologi Komunikasi, Teori Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Bactiar Hasyim, *Swadaya Masyarakat Desa*, Yogyakarta: SC Yalampers, 2008
- Britha Mikkelesen, *Metode Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Andi Offset, 2003
- Isbendi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Koenraad Verhagen, *Pengembangan Keswadayaan (Pengalaman LSM di Tiga negara)*, Jakarta: Puspa Swara, 1996
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada, 2008
- Peter Hagul, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta : Rajawali Pers, 1992
- R. Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Thafa Media, 2016
- Suhartono, dkk, *Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonoi Daerah*, Jogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2001
- Samman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011
- Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*, Malang : Setara Press, 2016
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Wasisstiono Sadu dan Irwan Tahir, *Prospek Perkembangan Desa*, Bandung : CV Fokus Media, 2007
- Zanuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## B. Jurnal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Et Armila, Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, *Journal Ilmu Pemerintahan*, 2 (4); 1441-1452, (2016)
- Jopinus Saragih. G, *Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)*, Majalah Ilmiah Widya, Vol. 29 No. 319, April. 2012
- Jurnal Bina Praja | Volume 4 No. 4 Desember 2012 | 251-260
- Marlena, Potensi Dan Kekayaan Desa Dalam Rangka Pembangunan Ekonom, *Jurnal Nusamba Vol.1 No.2*, (2016)
- Mohamad Yuhdi Batubara, *Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 25, Nomor 1 Februari 2012
- Priyanto, Peran Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mungging Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, Volume 2 Nomor 1*, (2019)
- Roni Rustandi, *Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015*, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 4 No. 1, Juli, 2017,
- Rasyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*menjadi Perangkat Kecamatan, Volume III, Nomor 1 April 2017*

Wayan Mahayana, *Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*  
(Ejournal Ilmu Pemerintahan, 2013)

Yulia Neta, *Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, Agustus, 2012*

**C. Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016

Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa  
dan Lembaga Adat Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu"* yang ditulis oleh :

Nama : Muhamad Zironi  
Nim : 11627101080  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 Oktober 2021  
TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Setretaris  
**Musrifah, SH., MH**

Penguji I  
**N Hidayat, SH., MH**

Penguji II  
**Lysa Anggrayni, SH., MH**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalikus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMAD ZIRONI  
 NIM : 11627101080  
 Jurusan : ILMU HUKUM  
 Judul : PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DENGAN SWADAYA GOTONG ROYONG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 DI KEPENGHULUAN TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU

Pembimbing : Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH..

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 November 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL  
 NIP. 198804302019031010

1. Dilarang melindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERNTAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
KECAMATAN KUBU  
KEPENGHULUAN TELUK PIYAI PESISIR

Alamat: Jalan Lintas Pesisir

No :

Kode pos : 28991

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor: 140/SRP -TPP/II/2021/287

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Penghulu Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama	: MUHAMAD ZIRONI
Tempat, tanggal Lahir	: Sei Kubu, 01-05-1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
NIK	: 1407010105970003
Kewarga Negara	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar Mahasiswa
Ampat Tinggal	: Sungai Agas Kep. Teluk Piyai Pesisir

Benar nama yang tersebut di atas telah melakukan penelitian di Desa Kepenghuluan Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan Judul:

PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN SWADAYA GOTONG ROYONG BERDASARKAN PERATURAN MENTRI DALAM NEGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU.

Demikian Surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan

Teluk Piyai Pesisir, 09 September 2021  
PENGHULU TELUK PIYAI PESISIR

SUPRIYATNO

UIN SUSKA RIAU

1. Hak cipta Diindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

n.04/F.I/PP.00.9/7448/2021

Pekanbaru, 26 Agustus 2021

(Satu) Proposal  
Mohon Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MUHAMAD ZIRONI
NIM	: 11627101080
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: X (Sepuluh)
Lokasi	: Teluk Piyai Pesisir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAN MASYARAKAT DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN SWADAYA GOTONG ROYONG  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN  
2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT  
DESA DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Pembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap melanggar sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/43314  
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/F.II/PP.00.9/7448/2021 Tanggal 26 Agustus 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **MUHAMMAD ZIRONI**  
NIM / KTP : **11627101080**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Jenjang : **S1**  
Alamat : **PEKANBARU**  
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DENGAN SWADAYA GOTONG ROYONG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU**  
7. Lokasi Penelitian : **TELUK PIYAI PESISIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan:**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
3. Up. Kepala Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**UIN SUSKA RIAU**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Muhamad Zironi**, dilahirkan di Desa Sei Kubu pada 01 Mei 1997. Merupakan anak kedua dari Empat bersaudara, putri dari pasangan Syofian dan Rusna. Penulis menempuh Pendidikan mulai dari SD Negeri di Sungai Agas, Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir dan selesai pada Tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Mts Nurul Hidayah, Sungai Agas, Kec. Kubu, Kab, Rokan Hilir dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Kubu yang terletak di Teluk Merbau Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir dan tamat pada Tahun 2016.

Setelah itu pada Tahun 2016 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) sebagai mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara. Penulis magang di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir (KEJARI ROHIL) pada Tahun 2018 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kepenghuluan Teluk Pulau Hilir, Kecamatan Rimbo Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Pada tanggal 19 Oktober 2021 penulis dinyatakan lulus dengan skripsi yang berjudul ***“Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Dengan Swadaya Gotong Royong Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu”***.